



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, DAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB).

Rapat Ke : **9**
Tahun Sidang : 2016-2017
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat/ke- : Rapat Dengar Pendapat / ke - **9**
Dengan : Sestama BNPB
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari, Tanggal : **Selasa, 11 April 2017**
Waktu : Pukul 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1
Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat : **Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc.**
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, S.H.
Acara : Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Isu-isu aktual
Hadir : 1. orang dari 49 orang Anggota Komisi VIII DPR RI
2. Sestama BNPB dan jajaran

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat pada pukul 14.10 WIB, yang dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc. pada waktu dan tempat tersebut diatas.

3. Rapat Dengar Pendapat dimulai dengan pengantar dari pimpinan rapat dan dilanjutkan dengan penjelasan dari Sestama BNPB, serta tanggapan oleh anggota Komisi VIII DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan **Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana** dengan agenda, “**Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Isu-isu aktual**”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami dan mengapresiasi realisasi anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar **Rp2.884.243.056.196,-** (*dua trilyun delapan ratus delapan puluh empat milyar dua ratus empat puluh tiga juta lima puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*) atau sekitar 99,36% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya sebesar **Rp157.225.544.833,-** (*seratus lima puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah*) atau sekitar 95,02%.
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BNPB sebesar **Rp111.863.823.321,-** (*seratus sebelas milyar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah*) atau sekitar 98,97%.
 - c. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB sebesar **Rp10.649.097.907,-** (*sepuluh milyar enam ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah*) atau sekitar 96,81%.
 - d. Program Penanggulangan Bencana sebesar **Rp2.604.504.590.135,-** (*dua trilyun enam ratus empat milyar lima ratus empat juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah*) atau sekitar 99,66%.
2. Komisi VIII DPR RI mendesak Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memperhatikan masukan dan pandangan dari anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:

- a. Membuat *grand design* pemetaan, pencegahan/mitigasi serta penanganan penanggulangan bencana di Indonesia
- b. Mendorong penyelesaian peta risiko bencana menjadi skala yang lebih detil ditingkat kabupaten dalam rangka peningkatan alokasi anggaran untuk pencegahan bencana antara lain desa tangguh bencana.
- c. Melakukan pendekatan keagamaan dalam pencegahan bencana melalui pondok-pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnya.
- d. Meningkatkan sosialisasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana terutama di daerah rawan bencana dengan melibatkan peran masyarakat dan relawan serta lembaga usaha dengan mempertimbangkan kearifan lokal.
- e. Mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memanfaatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pemetaan risiko bencana.
- f. Mendorong pemanfaatan teknologi dan media sosial dalam mensosialisasikan dan menyebarkan informasi sebelum dan saat terjadinya bencana dan pasca bencana.
- g. Melakukan sinkronisasi anggaran bencana dengan kementerian terkait lainnya.
- h. Mendorong penguatan Identifikasi risiko bencana Hidro Meteorologi dan bencana Geologi serta kesiapsiagaan melalui sistem peringatan dini multi ancaman.
- i. Mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk melakukan pengkajian mengenai perubahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjadi Kementerian
- j. Meningkatkan kemitraan dengan Perusahaan dan Lembaga dalam pelaksanaan program-program penanggulangan bencana
- k. Melakukan kajian kelayakan penggunaan satelit dalam penanggulangan bencana
- l. Memfasilitasi Pemda agar aktif dalam proses penanggulangan bencana.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 16.45 WIB.

Jakarta, 11 April 2017
PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,

DR. IR. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc